

**FRANZ MAGNIS-SUSENO**

# **NILAI-NILAI BISNIS, RELIGIOSITAS & MORALITAS**

## **PENDAHULUAN**

28 tahun pembangunan dengan tekanan pada pembangunan ekonomi berhasil meletakkan landasan kokoh bagi usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih sesuai dengan cita- citanya tentang kehidupan yang bermutu. Akan tetapi kenyataan itu tidak berarti bahwa semua masalah sudah kita pecahkan atau bahwa cukuplah kalau kita meneruskan saja pola pembangunan ekonomis yang sedang berjalan saat ini.

Kemiskinan sudah berkurang, tetapi belum teratasi. Banyak orang yang dalam statistik sudah ke luar dari kemiskinan, tetap hidup pas-pasan. Pada waktu yang sama segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan bangsa Indonesia. Ket-

daksamaan antara mereka yang di atas dan massa masyarakat adalah sangat besar dan menurut kesannya malah menjadi semakin besar. Banyak contoh kekerasan sosial dapat ditunjuk. Banyak sekali ketidakadilan. **Keadilan sosial**, pesan tegas **Pancasila**, masih jauh dari terlaksana. Sekaligus dengan masalah ekonomis sebagian tidak kecil masyarakat juga terkena dampak globalisasi. Terjadi **distorsi** dan **disorientasi**.

Semua itu merupakan alasan tepat untuk mempertanyakan kembali pembangunan dari sudut moralitas. Dan karena moralitas bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh religiositasnya, terutama juga oleh faham agama tentang harkat kemanusiaan, maka di sini dipertanyakan bagaimana **moralitas** dan **religiositas** dapat memainkan peranan yang positif dalam pembangunan ekonomi.

Dalam ini saya akan maju dalam **tiga** langkah. **Pertama**, karena suatu moralitas sebaiknya jangan dipertanyakan di luar sebuah konteks, saya merumuskan konteks moralitas pembangunan ekonomi yang normatif di Indonesia dan perlu diandaikan, jadi yang menjadi landasan pembangunan. **Kedua**, saya mencoba menjelaskan bagaimana moralitas dan religiositas dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan **etis pembangunan** tersebut. **Ketiga**, mencoba menerjemahkan tuntutan moralitas dan religiositas itu ke dalam beberapa prinsip etika sosial sebagai aktualisasi tuntutan moralitas resmi bangsa Indonesia.

## **I. TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMIS INDONESIA**

Saya maju dalam empat langkah. Dengan (1) bertolak dari tujuan pembangunan pada umumnya dan (2) tujuan pembangunan ekonomis dalam GBNH, (3) saya merumuskan sasaran pembangunan dalam bahasa yang sedikit lain dengan maksud merangsang pikiran kita semua yang akhirnya (4) dijangkarkan dalam pesan-pesan normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **1. TUJUAN PEMBANGUNAN**

Tujuan pembangunan nasional dirumuskan dalam GBHN Bab 2 sub B, dan dalam Bab 3/C dirumuskan "sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua". Saya tidak perlu mengutip dua teks penting ini. Yang jelas ialah bahwa pembangunan bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan menunjang kehidupan masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita luhurnya, di mana masing-masing anggota dapat mencapai eksistensi yang bermutu, sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Acuan dasar adalah Pancasila.

### **2. SASARAN PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI**

GBHN selanjutnya memerincikan tujuan pembangunan jangka panjang kedua dalam pelbagai sasaran sektoral. Uraian tentang bidang ekonomi [3/E/1] dimulai dengan kalimat: "Terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi eko-

nomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata..." Inilah hasil-hasil positif yang perlu dinikmati oleh rakyat Indonesia berdasarkan pembangunan di bidang ekonomi. Jadi inilah tujuan spesifik pembangunan ekonomis.

Paragraf yang sama lantas langsung melanjutkan kalimat yang saya potong itu dengan menyebutkan pertumbuhan, stabilitas, industri, pertanian, koperasi dan seterusnya. Dengan lain kata, disadari sepenuhnya bahwa tujuan-tujuan bagus di atas hanya dapat tercapai apabila sasaran khas teknis-ekonomis itu tercapai juga.

Itu sesuatu yang penting. Mengkhawatirkan moralitas pembangunan tanpa terus-menerus merefleksikan kemungkinan operasional-ekonomis untuk merealisasikannya adalah perbuatan percuma. Moralitas di bidang ekonomi hanyalah jujur apabila bergerak dalam kerangka kemungkinan realisasi yang nyata. Saya akan kembali ke situ.

### **3. DUA TINGKAT TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMIS**

1. Maka pembangunan ekonomis mempunyai dua deretan tujuan, di dua tingkat permasalahan yang berbeda: sasaran spesifik ekonomis yang merupakan syarat segala kemungkinan pembangunan positif; dan kualitas kehidupan masyarakat yang mau didukung melalui ekonomi sehat, artinya melalui ekonomi yang mencapai sasaran-sasaran itu.

2. Sasaran spesifik ekonomis, khususnya ekonomi makro, di sini cukup saya rumuskan secara sederhana melalui "segi empat magis": Perekonomian semakin sehat semakin empat sasaran berikut berhasil tercapai semua: (1) Pertumbuhan, (2) kesempatan kerja bagi semua peminat, (3) stabilitas mata uang [inflasi 0%], dan (4) neraca perdagangan dengan luar negeri yang seimbang. Segi empat ini disebut magis karena empat sasaran ini nampak saling bertentangan, artinya sulit dapat tercapai bersama. Padahal itulah syarat pembangunan ekonomis yang berhasil. Jadi yang dituntut kebijakan ekonomi yang sangat canggih dan supel yang mengoptimalkan pencapaian sasaran-sasaran itu secara seimbang.

Dapat dikatakan bahwa tiap nasehat moral yang mengabaikan salah satu saja [apalagi beberapa] dari empat sasaran itu tidak mutu dan sebaiknya langsung masuk kotak. Nasehat-nasehat macam itu tidak lebih dari moralisme murahan.

Nah, atas dasar itu lalu kita merumuskan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang mau tercapai melalui pembangunan ekonomi. Di sinilah tempat moralitas masuk. Jadi meskipun empat unsur itu tidak boleh dilalaikan, apalagi unsur-unsur ini baru bersifat makro, akan tetapi kita tidak berhenti di situ.

3. Apakah tujuan-tujuan non-ekonomis pembangunan ekonomis itu? Sebenarnya apa yang ditulis dalam GBHN sudah betul dan jelas. Tetapi saya ingin merumuskannya dalam

bahasa yang sedikit berbeda [dan: butir nr. 4 berikut dalam GBHN tidak secukupnya tertampung!], dalam lima butir. Jadi melalui kebijakan ekonomis makro [yang mengindahkan segi empat magis tadi] dan mikro, tujuan-tujuan berikut perlu diusahakan:

1. Kesejahteraan umum.
2. Penghapusan [dimulai dengan: pengurangan] kemiskinan.
3. Ketahanan nasional yang ampuh, artinya "kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara" [GBHN 2/F]; dapat ditambah bahwa ketahanan nasional menjamin agar bangsa [bangsa Indonesia] dapat mempertahankan kedaulatan nasional dalam arti, tetap mampu menentukan sendiri kehidupannya dan tidak didikte oleh negara lain atau lembaga LN.
4. Pemeliharaan lingkungan hidup yang utuh.
5. Kemampuan untuk ikut menyumbang pada perdamaian dan kesejahteraan dunia.

#### **4. PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Lima tujuan itu dengan sendirinya akan kita tempatkan atas landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Lima sila Pancasila menjadi prinsip dasar bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara spesifik arti pendasaran itu bagi bidang ekonomi diuraikan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Pasal itu memuat pesan etis para pendiri Republik bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Pesan mereka adalah agar perekonomian bangsa menguntungkan seluruh masyarakat, dimiliki oleh seluruh masyarakat serta melibatkannya, agar kita bersama-sama mengambil tindakan nyata untuk menjamin bahwa jangan sampai ada golongan yang memonopolikan hasil pembangunan dan jangan ada golongan masyarakat yang tidak diikutsertakan atau yang dijadikan korban belaka. Jadi imperatif untuk merealisasikan, sedekat mungkin, masyarakat senasib sepenanggungan. Secara khusus, orang-orang miskin, lemah, terlantar dititipkan kepada kita. Dalam arti ini demokrasi ekonomi berarti ekonomi kekeluargaan, di mana semua anggota masyarakat dipelihara, dengan tekanan dan prioritas kepada mereka yang paling membutuhkannya. Jadi yang dituntut oleh UUD 1945 adalah pewujudan sebuah masyarakat yang adil dan manusiawi, yang mempunyai hati bagi anggota-anggotanya yang lemah.

## **II. MORALITAS DAN RELIGIOSITAS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMIS**

Dengan demikian, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan utama sesi ini, kita sudah mempunyai sebuah konteks bagi etika pembangunan ekonomi bangsa yang luas dan kaya. Kita tidak perlu, dan memang tidak boleh, bertolak dari udara

kosong. Pertanyaan sekarang dapat dirumuskan sbb.: Apa kaitan antara pembangunan ekonomis dengan moralitas dan religiositas?

## **1. MORALITAS DAN RELIGIOSITAS**

Moralitas agama dan religiositas sebenarnya hampir sama artinya. Yang pertama menegaskan bahwa agama memuat nilai-nilai, visi-visi dan tuntutan moral. Yang kedua mengandaikan bahwa moralitas itu tidak lepas dari pandangan agama-agama tentang manusia.

Di sini kita dapat masuk ke dalam pembicaraan panjang lebar tentang pandangan manusia agama-agama. Akan tetapi barangkali lebih berguna kalau kita melanjutkan pertanyaan tentang moralitas pembangunan ekonomis: Apakah agama-agama, dengan pandangan moral mereka, dapat membantu agar pembangunan ekonomis lebih sesuai dengan tujuannya?

## **2. SUMBANGAN MORALITAS DAN RELIGIOSITAS**

Seperti sudah dijelaskan, di sini tidak dicoba untuk dari udara kosong merumuskan pelbagai prinsip, tuntutan atau tujuan moralitas agama. Pendekatan itu ahistoris dan lepas konteks dan oleh karena itu kurang relevan.

Melainkan kita bertolak dari tujuan pembangunan ekonomis yang telah saya uraikan dengan panjang lebar, dan dari beberapa segi, dalam bagian pertama. Tujuan-tujuan itulah

yang harus tercapai. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomis secara moral dapat dipertanggungjawabkan semakin diusahakannya untuk mengarahkannya pada pencapaian tujuan-tujuan itu.

Yang sekarang kita tanyakan ialah: Apakah agama-agama dapat membantu dalam pencapaian tujuan-tujuan itu. Dan apakah yang dapat disumbangkan oleh agama-agama agar masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila menjadi tujuan yang sungguh-sungguh mengarahkan pengambilan kebijakan ekonomi di negara kita?

Sebelum mencoba menjawab pertanyaan ini, barangkali perlu sebuah catatan. Menurut hemat saya pertanyaannya bukan apakah dalam pembangunan faktor supernatural dilibatkan atau diabaikan. Kalau kita misalnya membangun pesawat terbang, kita celaka betul kalau pesawat itu hanya kita harapkan tidak akan jatuh apabila faktor-faktor supernatural dimobilisasikan. Mengkonstruksikan adalah tindakan dalam dimensi teknis, teknik adalah unsur alami, di situ unsur supernatural tidak pada tempatnya. Begitu pula membangun perekonomian nasional adalah tindakan dalam dimensi duniawi, ya di bidang produksi di mana terutama segi empat magis selalu harus diperhatikan. Mencampurkan kebijakan ekonomi dengan hal supernatural adalah takhayul. Bahkan kalau pun seorang menteri rajin berdoa, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa ia mengambil kebijakan yang tepat.

Yang supernatural masuk di dimensi yang lain. Dan di situ kita lebih baik bicara langsung terhadap yang seharusnya menjadi kerangka acuan akhir [the final frame of reference] segala tindak-tanduk kita: Tuhan. Tuhan bukan unsur dalam dunia dan oleh karena itu Tuhan bukan bagian dalam bestek pembuatan pesawat terbang dan bukan input dalam kebijakan ekonomi. Tuhan itu mutlak. Dan oleh karena itu Tuhan masuk hidup kita di mana kita berhadapan dengan Yang Mutlak, dalam moralitas kita. Acuan pada Tuhan itu harusnya membuat kita mau bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, tanpa pamrih, dengan bersedia mendahulukan kepentingan bersama, dengan menolak perbuatan yang tidak adil, dengan perhatian pada hak dan harga diri orang dan golongan lain, dengan menolak korupsi dan kolusi.

Nah, jelas sekali bahwa acuan [reference] pada Tuhan harusnya menjadi motivasi dan dorongan paling kuat untuk berkarya dengan sebaik mungkin. Saya menolak anggapan bahwa hanya orang ber-Tuhan dapat bermoral. Anggapan ini bagi saya berbau munafik mengingat betapa banyak korupsi, ketidakadilan, kekejaman, dan ketidak-pedulian dilakukan oleh orang-orang beragama. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa seharusnya orang beragama, justru karena ia sadar bahwa ia bekerja di hadapan Tuhan, lebih bermoralitas dan lebih terbuka bagi kepentingan sesama daripada orang yang tidak memiliki acuan itu.

Jadi **agama** seharusnya amat sangat mendukung **etika pembangunan**. Bukan dengan secara abstrak dan moralistik mengkhotbahkan ekonomi harus begini atau begitu. Hal itu melampaui wewenang dan kompetensi agama. Melainkan dengan **mendukung** kejujuran, tanggungjawab, perhatian pada kebutuhan mereka yang lemah, penolakan terhadap ketidakadilan, penipuan, korupsi dan pamrih.

Dapat juga dikatakan: Agama merupakan **peringatan keras** bahwa perekonomian tidak merupakan tujuan pada dirinya sendiri, bahwa, misalnya, pertumbuhan tidak berguna dan tidak masuk akal, kecuali dapat dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkannya. Jadi agar jangan ekonomi sekedar dikemudikan oleh dinamikanya sendiri yang lantas mesti melindas orang kecil dan hanya melayani mereka yang menguasai bidang ekonomi.

### **3. TANTANGAN BAGI ORANG BERAGAMA**

Agar agama dapat memainkan peranan ini, orang-orang beragama kiranya perlu mempertanyakan sikap mereka sendiri. Terlalu sering kita menyaksikan sikap orang yang duduk di pinggir jalan di mana kafilah ekonomi lewat, dan dari pinggir itu mereka melontarkan pelbagai tuntutan yang bunyinya suci tetapi tidak ada kaitan dengan kafilah itu. Barangkali dari orang-orang kafilah itu mereka mendapat makanan dan air minum dan derma, juga supaya mereka tidak membuat kaget

unta-unta kafilah itu. Akan tetapi mereka tetap hanya penonton yang seenaknya menyuarakan macam-macam.

Yang diperlukan adalah bahwa cita-cita moralitas agama masuk ke dalam kafilah perekonomian itu. Agar ada keahlian ekonomis, keterbukaan, partisipasi, tanggungjawab. Kalau begitu, agama dapat membawa moralitas juga dalam bentuk kritik. Jadi agama-agama barangkali tidak menawarkan sistem perekonomian sendiri, akan tetapi mereka dapat menyuarakan kekecewaan rakyat, ketertindasan orang kecil, suara mereka yang tidak dapat bersuara. Jadi orang-orang beragama jelas-jelas harus berdiri di pihak orang lemah dan kecil, itu pun tanpa pamrih. Dan jangan mau berkolusi dengan mereka yang menginjak hak-hak dan kehidupan orang kecil.

### III. TIGA WAWASAN ETIKA DALAM BISNIS

Lebih tepat kita dapat bicara tentang tiga wawasan yang seharusnya dimiliki seorang pebisnis pada akhir abad ke-20: Wawasan kepentingan nasional berhadapan dengan kepentingan egois sempit, wawasan lingkungan hidup berhadapan dengan wawasan yang semata-mata mengejar keuntungan, dan wawasan keadilan sosial.

1. Wawasan nasional -yang perlu dilengkapi dengan wawasan perdamaian dan tanggungjawab internasional- berarti bahwa usaha bisnis dilihat sebagai partisipasi dalam pembangunan, artinya, diarahkan pada pencapaian kesejahteraan

seluruh bangsa. Tentu saja, masing-masing usaha harus memperhatikan dan menjamin kepentingannya sendiri. Ia harus mencari laba. Tetapi jangan hanya itulah yang dicari. Bisnis hanya memadai secara etis apabila dia memandang diri sebagai bagian dari usaha seluruh bangsa untuk membangun bersama kehidupan masyarakat yang sejahtera, bebas, sesuai dengan harkat kemanusiaan setiap warga masyarakat.

2. Wawasan **lingkungan hidup**: Kegiatan dan usaha apa pun dewasa ini berkewajiban berat untuk menjaga kelestarian, kebersihan dan keutuhan lingkungan hidup. Tanggungjawab terhadap dunia ciptaan Allah yang dititipkan kepada kita, tanggungjawab terhadap generasi-generasi yang akan datang, yang berhak mewarisi dunia yang tidak rusak, serta tuntutan survival umat manusia sekarang menuntut wawasan lingkungan hidup itu. Secara singkat wawasan itu berarti bahwa bisnis kita tidak merusak atau mengotori lingkungan hidupnya, bahwa ia tidak mengurangi kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Lebih konkret: bisnis itu meninggalkan bumi sama bersih dan sehatnya seperti pada waktu ia mulai menggarapkan.

3. Akan tetapi fokus bagian terakhir prasaran ini diberikan kepada wawasan **keadilan sosial**. Karena bidang ini yang barangkali paling menentukan di Indonesia. Dalam uraian ini saya mendasarkan diri pada ajaran yang selama lebih dari seratus tahun dikembangkan oleh Gereja Katolik, yang saya ang-

gap sebenarnya sama sekali bukan khas Katolik, melainkan tentu berlaku bagi bisnis lain juga. Ajaran itu hasil refleksi atas perubahan-perubahan sosial mendalam dalam hubungan kerja sebagai akibat revolusi industri, terutama terciptanya proletariat buruh industri di bawah kapitalisme purba. Hasil refleksi itu adalah bahwa pendekatan karitatif tidak mencukupi, karena masalah perburuhan bersifat struktural, dan bahwa masalahnya bukan sekedar masalah kemiskinan, melainkan masalah ketidakadilan. Refleksi itulah menghasilkan apa yang umumnya disebut ajaran sosial Gereja Katolik.

Dalam hubungan dengan dunia bisnis tuntutan itu berarti: Tanpa menyangkal bahwa dunia bisnis harus berfungsi menurut ekonomi pasar, akan tetapi dia harus dijalankan dalam solidaritas nyata dengan orang-orang lemah dalam masyarakat. Jadi dunia bisnis harus menguntungkan justru mereka yang paling membutuhkannya.

## PENUTUP

Ini beberapa gagasan sederhana bagaimana moralitas dan cita-cita kemanusiaan agama-agama dapat menjadi prinsip-prinsip etis yang menjamin kewajaran pembangunan ekonomis, sedemikian rupa sehingga pembangunan itu mendukung pewujudan kehidupan manusia dalam semua seginya secara utuh.

